

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dalam Mendukung Pembangunan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Retno Damayanti¹, Ratri Istania², Arifiani Wijayanti³
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak¹
Politeknik STIA LAN Jakarta^{2,3}

rrdamayanti16@gmail.com¹, ratri.istania@stialan.ac.id², ar.widjayanti@gmail.com³

Abstract

The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection issued a Rural Women's Leadership Policy through the 2020-2024 National Priority Program as an effort to improve the quality of rural women's leadership potential through women's leadership training. In this study, located were selected in NTB Province, namely in two regions, namely Regency are Lombok Timur dan Lombok Utara. However, based on the results of the evaluation of policy performance levels, problems were still found regarding the effectiveness of coordination, collaboration and communication between parties, especially in regional governments. Apart from that, the budget and human resources are still inefficient. Another thing that was also found was the problem of comparing the two regions regarding the ineffectiveness and responsiveness of training results in Lombok Utara, the same results at the post-training mentoring stage, namely that Lombok Utara participants were considered less effective, and were also considered less effective at the monitoring and evaluation stage of the policies implemented. This research was conducted using William Dunn's Policy Evaluation Theory. The research results concluded that the most appropriate evaluation of rural women's leadership policies to be implemented in the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection is the Alternative Collaborative Management Team Policy. This Policy Alternative emphasizes the concept of collaboration between parties who can work together effectively in formal and regular contexts. It is hoped that the research results can provide input to the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection starting from preparation, planning, implementation, mentoring and monitoring, evaluation to make it more effective, efficient and responsive so that it can achieve its goals. the objectives of the policy itself.

Keywords: leadership policy; policy evaluation; women's leadership; gender; village women

Abstrak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan potensial perdesaan melalui pelatihan kepemimpinan perempuan, pada penelitian ini dipilih lokus di Provinsi NTB yaitu di dua wilayah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi terhadap tingkat kinerja kebijakan tersebut, masih ditemukan permasalahan terkait efektivitas koordinasi, kolaborasi, komunikasi antar pihak terutama pada pemerintah daerah. Selain itu, masih kurang efisiennya sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia. Hal lain ditemukan juga masalah perbandingan dua wilayah terkait tidak efektif dan responsivnya hasil dari pelatihan di Lombok Utara, hasil yang sama dalam tahap pendampingan paska pelatihan bahwa peserta Lombok Utara dinilai kurang efektif, serta ditemukan juga kurang efektivitasnya pada tahap monitoring dan evaluasi kebijakan tersebut dilaksanakan. Penelitian dilakukan menggunakan Teori Evaluasi Kebijakan William Dunn. Hasil Penelitian menyimpulkan evaluasi kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan yang paling tepat diterapkan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Alternatif Kebijakan Tim Manajemen Kolaborasi. Alternatif Kebijakan ini menekankan pada konsep kolaborasi antar pihak yang dapat bekerjasama secara efektif dalam konteks formal dan bersifat reguler. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kepada Kementerian PP dan PA mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan monitoring evaluasi agar lebih efektif, efisien, dan responsive sehingga mampu mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Kata Kunci: kebijakan kepemimpinan; evaluasi kebijakan; kepemimpinan perempuan; gender; perempuan desa

PENDAHULUAN

Prinsip SDG's yaitu *leaving no one behind* membawa konsekuensi dipastikannya semua kelompok masyarakat terlibat merasakan manfaat Pembangunan. Salah satu goals SDG's menyebutkan pentingnya Negara menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan menjadi salah satu target yang akan dicapai (goal ke-5). Dengan memastikan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya diperhitungkan dalam setiap proses pembangunan akan berkontribusi secara signifikan pada tercapainya tujuan.

Salah satu indikator capaian pembangunan bidang kesetaraan gender di Indonesia adalah Indeks Pembangu Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Menurut data dari BPS capaian kemajuan Indonesia menunjukkan perkembangan yang kurang signifikan. Data tersebut menunjukkan realita bahwa perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, hingga Keterwakilan Politik. Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menegaskan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan *equal right* hingga ke level desa. Begitu juga strategi untuk mengatasi ada kesenjangan dan diskriminasi adalah Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan IPG dan IDG khususnya mendorong partisipasi perempuan adalah dengan mengimplementasikan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam bidang politik. Keterlibatan perempuan dalam politik dapat diartikan secara luas yaitu partisipasi politik dalam bentuk electoral dan non electoral. Data dari BPS menunjukkan partisipasi perempuan dalam legislative pemilu tahun 2019, masih mencapai 20,8%. Partisipasi politik non-elektoral adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam proses pembangunan, misalnya dalam Musyawarah Desa dan Musrenbang, bahkan pengambilan keputusan dalam keluarga.

Walau perempuan Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan, namun budaya patriarki, norma adat, dan agama masih mengakar kuat diberbagai lini kehidupan. Jane (2022) menyampaikan faktor adat, budaya, dan agama memainkan peranan penting dalam urusan kepemimpinan perempuan di berbagai masyarakat dan negara. Faktor tersebut sering menerapkan norma gender yang kaku bahwa perempuan harus berperan dalam ranah domestic. Berdasarkan data dari Dinas DP3AKB di Kabupaten Lombok Timur Jumlah Kepala Desa Perempuan masih berjumlah satu orang sedangkan Kepala Desa perempuan di kabupaten Lombok Timur masih belum ada. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh norma adat, agama, dan budaya patriarki setempat.

Kepemimpinan perempuan perdesaan padahal memiliki potensi besar untuk membawa perubahan yang positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa baik dalam bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Pengambilan Keputusan. Karena pada kenyataannya disampaikan Puspayoga dalam Buku Daya Perempuan Akar Rumput (2020) di Indomnesia masih menghadapi masalah tingginya Kematian Ibu Melahirkan, Pernikahan Usia Anak, Kejerasan Terhadap Perempuan, Kemiskinan Perempuan, Pekerja Informal tanpa Perlindungan Hukum, dan Rendahnya Partisipasi Politik dan Kepemimpinan Perempuan. Oleh karenanya, perempuan harus terlibat berpartisipasi melalui kepemimpinan untuk dirinya, keluarganya, dan lingkungan di desanya. Misiyah dalam Buku Daya Perempuan Akar Rumput (2020) Kepemimpinan para perempuan akar rumput perdesaan dicerminkan melalui kemampuan dan komitmen mendorong perubahan sosial, budaya, politik agar lebih setara dan berkeadilan gender. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci dalam pelaksanaan organisasi dengan cara

menerapkan strategi inovatif secara berkelanjutan, yang mampu menghasilkan cara-cara baru dalam mencapai tujuan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Karunia, 2020).

Rosaline (2021) menyampaikan dalam Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan bahwa kondisi perdesaan masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar dibandingkan perkotaan. Kesenjangan termasuk dalam bidang politik konteks kesetaraan gender. Perempuan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan jumlahnya masih rendah,. Hal ini juga dapat dilihat dari BPS data IDG Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan belum maksimal peran perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan, serta sumbangan pendapatn perempuan. Begitu juga IDG di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara masih berada dibawah rata-rata nasional. Kemudian data dari Dinas DP3AKB Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara masih terdapat tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak serta tingginya kasus pernikahan usia anak (Susenas BPS, 2021).

Dalam uraian latar belakang diatas pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Lembaga Pemerhati Perempuan (KAPAL Perempuan) serius untuk mengupayakan kesenjangan yang ada di Provinsi NTB dengan mengeluarkan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan yang merupakan Program Prioritas Nasional 2020-2024 dengan menguatkan kapasitas bagi perempuan perdesaan di NTB terpilih dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Oleh karenanya dengan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan apa yang dipraktekkan di lingkup desa perlu mendapat perhatian. Kualitas kepemimpinan juga sangat penting dalam implementasi kebijakan tersebut, karena yang membawa perubahan bagi organisasi untuk menginspirasi, berinovasi, dan mengambil keputusan strategis yang mendorong transformasi serta peningkatan berkelanjutan dalam mencapai tujuan organisasi (Suryanto, 2018).

Pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 yaitu pelatihan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi perempuan potensial perdesaan di Provinsi NTB Tahun 2020 sudah baik, namun jika melihat tujuan dan hasil dari rapat evaluasi awal tahun 2021 antara Kementerian PP dan PA dan Lembaga Pemerhati Perempuan belum optimal seperi faktor anggaran, waktu, pengetahuan dan pengalaman peserta yan timpang, komitmen pemerintah daerah. Apabila beberapa permasalahan tersebut belum mendapat evaluasi, upaya, atau rekomendasi akan berdampak pada capaian kinerja yang kurang maksimal. Kepemimpinan perempuan di desa dengan pembagian fungsi di antara pemerintah pusat dan daerah, otoritas tingkat yang lebih rendah dengan demikian lebih mandiri untuk membuat keputusan di bidang kebijakan tertentu, termasuk aspek anggaran, dan tidak perlu meminta persetujuan dari pemerintah pusat setiap saat (Silitonga et al., 2016). Maka, pemerintah dapat membangun sistem informasi organisasi bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi para pengguna, sehingga mendukung kepemimpinan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien (Karunia et al., 2023).

Kajian evaluatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis seputar efektivitas kebijakan kepemimpinan perempuan di perdesaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak nyata yang telah dicapai, hambatan yang dihadapi, dan peluang yang terbuka. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat merinci peran vital kepemimpinan

perempuan sebagai kunci menuju desa yang berkelanjutan, inklusif, dan adil (Asropi, (2020). Karena untuk saat ini, Arah pembangunan kini bergeser dari fokus perkotaan ke pedesaan, menandai peralihan prioritas dari pembangunan perkotaan menuju peningkatan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan di wilayah pedesaan (Suryanto & Nugroho, 2020).

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka diajukan pertanyaan yaitu sejauhmana tingkat kinerja Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Lombok Utara terhadap perempuan potensial perdesaan yang masih rendah akses dan kapasitasnya dalam berpartisipasi di penyelenggaraan pemerintah desa, serta bagaimana bentuk rekomendasi atas kebijakan tentang Kepemimpinan Perempuan Perdesaan ditahun-tahun selanjutnya

KAJIAN LITERATUR

Penelitian terdahulu berfokus pada Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan di desa, antara lain :

1. Jane (2022) penelitian ini terkait hambatan-hambatan yang berkaitan dengan faktor sosial budaya yang kerap terjadi di negara berkembang pada level pemerintahan di Kabupaten seperti di Negara Kenya;
2. Duflo (2021) yang meneliti di Negara India bahwa kondisi keterwakilan perempuan berpengaruh pada akses kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan di level desa;
3. Melisa (2002) menjelaskan studinya bahwa kultur juga bermain di level organisasi, bahwa kiprah perempuan di organisasi keagamaan di negara dengan dominasi penduduk muslim ternyata memiliki kesamaan dalam temuan yaitu budaya patriarki;
4. Maria (2008) yang melihat bahwa di Negara Indonesia, Kepemimpinan Organisasi NU perempuan menemukan bahwa budaya patriarki merupakan penyebab perempuan terhambat dalam partisipasi politik;
5. Wells (2020) yang meneliti di Jambi Indonesia partisipasi perempuan di organisasi pemerintahan, memiliki hambatan yaitu perempuan tidak diberi ruang public serta norma gender tradisional menyebutkan perempuan hanya sebagai pengikut dan bukan sebagai pemimpin;
6. Duflo (2012) dalam kajiannya di Negara India bahwa perempuan memiliki hambatan pada yaitu rendahnya tingkat pendidikan dibandingkan laki-laki;
7. Alfiyah (2021) meneliti terkait kapasitas pemimpin perempuan di Desa Lembang Jawa Timur menunjukkan bahwa peran atau fungsi laten kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan diperlukan kemampuan, ketrampilan, dan keberanian;
8. Sugiyanto (2021) menjelaskan bahwa pro dan kontra kepemimpinan perempuan dari berbagai perspektif antarlain dari studi Pustaka, Al-Quran, Jurnal, dan kajian ilmiah. Temuan awal penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya pro dan kontra berdasarkan sudut pandang dan konsep pemahaman yang berbeda.
9. (Suryanto, Prasetyo, et al., 2023) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah di jelaskan pada pasal 69 terkait kompetensi yang wajib dimiliki oleh PNS yaitu kompetensi teknis, manajerial dan sosial budaya. Kompetensi manajerial yang dilihat dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, tidak memandang baik itu PNS pria atau wanita siapapun harus menguasainya.
10. (Nugroho & Rahayu, 2020) dalam penelitiannya menyatakan inovasi merupakan syarat utama bagi sebuah organisasi untuk berkembang. Mewujudkan transformasi organisasi melalui perubahan nilai dan budaya organisasi dari kerja konvensional ke

digital. Seorang pemimpin yang membawa pendekatan yang kreatif dan membangun kerja sama yang kuat di dalam tim.

11. (Suryanto, Nurdin, et al., 2023) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara efisien. Pemanfaatan teknologi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengukur dampak kebijakan kepemimpinan perempuan di perdesaan. Melalui pendekatan digital, kita dapat menyelidiki secara lebih mendalam, merinci, dan mengukur indikator-indikator kritis yang mewakili progres pembangunan desa dengan fokus pada peran perempuan.
12. (Silitonga et al., 2019) Pemimpin, sebagai figur yang memiliki otoritas formal, memiliki peran sentral dalam menetapkan harapan. Tugas mereka mencakup memudahkan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menjadi contoh yang diikuti, dan membimbing perilaku serta pengambilan keputusan oleh anggota organisasi lainnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provisni NTB yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian ini akan membahas secara spesifik bagaimana menilai tingkat kinerja Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provisni NTB yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat memberikan dampak dan manfaat bagi perbaikan kebijakan pembangunan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan teori *Evaluasi Kebijakan* ((Patton et al., 2015) yang terdiri dari enam kriteria evaluasi, yaitu :

1. Efektifitas (*effectiveness*). Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi (*efficiency*). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan (*equity*). Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajiban dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan

semua kriteria lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (*appropriateness*). Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan perbandingan studi kasus. Yusuf (2017) menyampaikan bahwa secara umum mendeskripsikan, dan menjelaskan, dengan cara kritis, ataupun mendeskripsikan sebuah peristiwa, sebuah kejadian interaksi sosial pada masyarakat dalam mendapati arti atau pada konteks nyata. Arikunto (2010) memberikan, mendeskripsikan, dan menjelaskan secara kritis sebuah kejadian sosial melalui perbandingan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi NTB. Pendekatan komparatif menggambarkan permasalahan peristiwa melalui responden ataupun sumber data lainnya yang terkait Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan yang berada di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB. Penelitian ini lebih pada membandingkan objek serupa dari kedua Kabupaten tersebut dan mengidentifikasi kemiripan sehingga secara hipotesis menghasilkan akibat yang berbeda.

Most Similar System Design (MSSD)/ Metode Perbedaan (Anckar, 2018) metode ini terdiri dari perbandingan kasus yang sangat mirip yang hanya berbeda variable dependen, dengan asumsi bahwa cara ini lebih mudah untuk mengidentifikasi-variable independent yang menjelaskan ada/ tidaknya variable dependen. Strategi ini sangat membantu karena membandingkan objek-objek yang serupa dan mencoba mengidentifikasi mengapa hasil yang didapatkan antar subjek dapat berbeda.

Teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Wawancara menggunakan teknik *purposive sampling*. Beberapa tahap dalam melakukan analisa data diantaranya dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan telaahan atas laporan penyelenggaraan pelatihan tersebut. Dari data yang telah terkumpul kemudian dilakukan seleksi dan dilakukan pengelompokan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap 22 (dua puluh dua) orang *key informan* dengan pendekatan *purposive sampling* dengan rincian pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Key Informan

No.	Key Informan	Jumlah
1.	Pejabat dan Staff Kementerian PP dan PA	3
2.	Tim Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan	3
3.	Dinas Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten	3
4.	Fasilitator Pelatihan	2
5.	Tim Administrasidari Lembaga Masyarakat	2
6.	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat	3
7.	Peserta Pelatihan	6
	Total	22

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat penting memastikan bahwa upaya pemberdayaan perempuan khususnya di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara apakah sudah efisien, efektif atau berkelanjutan. Evaluasi Kebijakan ini seharusnya dapat menunjukkan kehadiran perempuan dalam kepemimpinan desa memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan di desa. Oleh karenanya agar mampu menghadirkan perempuan perempuan pemimpin di perdesaan. Suryanto (2023) menjelaskan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara inklusif dan berkeadilan merupakan hak bagi para PNS. Pengembangan kompetensi ini diharapkan akan meningkatkan semangat dan motivasi dalam konteks ini bagi PNS perempuan, untuk kemajuan karirnya hingga di anggap kompeten untuk menduduki jabatan pimpinan di instansinya. Kementerian PP dan PA memiliki Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 yaitu melaksanakan pelatihan penguatan kapasitas bagi perempuan potensial desa di dua Kabupaten yang sudah dilaksanakan di tahun 2020 di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan di desa adalah:

1. Persiapan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara

a. Efektivitas

Persiapan dalam melaksanakan kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara melalui program pelatihan, tentunya Kementerian PP dan PA telah menjalin Kerjasama dengan Lembaga Pemerhati Perempuan (KAPAL Perempuan). Kerjasama ini sangat penting karena mengangkat isu-isu besar perempuan dan anak, yang tentu tidak bisa diatasi sendiri oleh satu pihak instansi pemerintah saja. Namun data di lapangan menunjukkan dalam tahap persiapan, seringkali dari pihak pemerintah daerah kurang maksimal dalam menindaklanjuti program tersebut. Keterlibatan yang tidak efektif mengakibatkan peran dan tanggungjawab secara entitas tidak dapat berjalan secara optimal. Baik berupa perbedaan pemahaman dan pandangan, pergantian pimpinan, atau keterbatasan SDM. Dapat disimpulkan dalam mengimplementasikan kebijakan dibutuhkan *engagement* persiapan antar pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, koordinasi, komunikasi, kolaborasi di tahap persiapan belum efektif. Seperti yang dikemukakan Dunn (1999) bahwa berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis.

b. Efisiensi

Kemudian lain hal, terkait Anggaran biaya dinilai kurang fleksibel karena aturan anggaran yang kaku dan tidak efisien, tidak memungkinkan melakukan perubahan yang cepat/ tidak bisa adaptif dalam menghadapi perubahan karena perlu revisi administrasi dan surat addendum yang cukup panjang dan rumit. Serta keterbatasan anggaran, tidak dapat memenuhi kebutuhan peserta pelatihan yang harusnya menginap (tidak pulang pergi) sehingga dianggap kurang efisien dan mempengaruhi keterlibatan peserta, serta keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pembiayaan tim desain untuk penambahan substansi lima arahan presiden ke dalam modul juga tidak terpenuhi. Selain itu dalam hal persiapan

pencarian calon peserta masalah jarak dan waktu, latar belakang, dukungan dari keluarga dan lingkungan dianggap tidak efisien sehingga mempengaruhi jumlah kualitas dan kuantitas calon peserta pelatihan. Dengan demikian, dapat disimpulkan indikator Efisien oleh Dunn (1999) sangat mempengaruhi jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu seperti persiapan sumber daya anggaran dan sumberdaya manusianya.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara

a. Lombok Timur

Hasil observasi dan laporan kegiatan dari Lembaga Masyarakat terkait pelaksanaan pelatihan kepemimpinan perempuan di Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan pada tanggal 9-11 November 2020 dan 12-14 November 2020 selama tiga hari di Aula LPSPDM diselenggarakan dua kelas sesuai protokol kesehatan masing-masing jumlah peserta sebanyak limabelas orang dari 15 Desa terpilih yaitu Ketapang Raya, Pijot, Batu Nampar, Batu Nampar Selatan, Pandan Wangi, Montong Betok, Lenek Kalibambang, Lenek Duren, Kembang Kerang, Bagik Payung Timur, Labuhan Lombok, Mumbul Sari, Belanting, Bintang rinjani, dan Dadap dengan jumlah total peserta tigapuluh orang.

a.1.Responsivitas

Hasil pelatihan ini terbantu dengan latar belakang peserta yang sebagian besar adalah Anggota Sekolah Perempuan, Tim 11 yaitu Tim Perumus RPJMDes. Peserta juga sudah mendapat intervensi dan pendekatan dengan melalui proses yang cukup panjang dan matang dari Sekolah Perempuan meskipun ada isu keterbatasan jarak dan waktu, dukungan keluarga dan lingkungan, norma agama, adat, serta budaya patriarki yang cukup kuat. Namun hal ini dapat diatasi oleh peserta Lombok Timur, karena disamping memiliki latar belakang anggota Sekolah Perempuan juga dari pihak Sekolah Perempuan/ LPSPDM juga pernah memberikan edukasi isu kesetaraan gender kepada pasangan/partner, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat setempat. Dengan demikian, dari hasil wawancara dengan beberapa Informan hasil pelatihan di Lombok Timur memiliki tingkat Responsivitas yang tinggi, seperti yang dinyatakan Dunn (1999) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu, yaitu dalam hal ini peserta potensial perempuan perdesaan memperoleh manfaat dari hasil pelatihan. Peserta merasakan kepuasan terhadap fasilitator, materi, dan metode yang sangat baik dan banyak membantu dan manfaat kepada mereka pada saat menjalankan tugasnya di desanya.

b. Lombok Utara

b.1. Efektivitas

Pelatihan yang diselenggarakan di Lombok Utara melibatkan tigapuluh peserta dari limabelas desa yaitu Sambik Elen, Bayan, Anyar, Sukadana, Salut, Gumantar, Sesait, Senaru, Santong, Kayangan, Loloan, Mumbul Sari, Karang Bajo, Santong. Pelaksanaan pelatihan pada tanggal 2-4 November 2020 dan 5-7 November 2020 dibagi menjadi dua kelas masing-masing lima belas orang peserta dan sesuai protokol Kesehatan. Materi yang diberikan sama dengan peserta Lombok Timur adalah pemetaan masalah-masalah perempuan, pendalaman konsep dan dampak dari seks dan gender, bentuk ketidakadilan gender, faktor penyebab pelestari ketidakadilan gender, kepemimpinan perempuan, strategi kepemimpinan perempuan melalui advokasi dan pengorganisasian, serta menyusun program dan anggaran desa tang responsive gender. Berdasarkan data wawancara lapangan hasil yang dicapai ternyata kurang efektif

karena seperti yang disampaikan Dunn (1999) tidak mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau tidak mencapai tujuan. Meskipun mencapai hal yang positif namun peserta Lombok Utara hanya sebagian yang memahami dan meningkatkan kemampuannya menerima hasil pelatihan. Beberapa kendala yang mengakibatkan hasil yang tidak efektif adalah latar belakang peserta yang Sebagian kecil anggota Sekolah Perempuan, kurangnya dukungan suami dan lingkungan, jarak rumah yang jauh dan waktu pelatihan yang terbatas.

3. Pendampingan Setelah Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara

Pendampingan setelah kegiatan pelatihan adalah tahapan penting untuk memastikan bahwa peserta dapat menerapkan keterampilan dan pengetahuannya yang mereka peroleh selama mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil laporan kegiatan dari Lembaga Masyarakat KAPAL Perempuan Langkah-langkah yang diambil adalah Sesi Evaluasi dan Membuat Rencana Aksi. Namun dari hasil pendampingan nampak hasil yang tidak efektif pada peserta Lombok Utara karena jumlah peserta yang didampingi hanya setengah dari total peserta pelatihan sedangkan peserta Lombok Timur jauh lebih banyak yaitu 25 peserta. Banyak kendala yang dirasakan oleh peserta Lombok Utara yaitu latar belakang peserta yang Sebagian kecil anggota Sekolah Perempuan, kurangnya dukungan suami dan lingkungan, jarak rumah yang jauh dan waktu pelatihan yang terbatas, serta terbentur dengan norma adat, agama, dan budaya patriarki.

4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara

Monitoring dan Evaluasi juga merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan baik dan mencapai tujuan namun dapat disimpulkan berdasarkan observasi dan hasil wawancara di lapangan kebijakan dari Kementerian PP dan PA dalam menjalankan program ini dinilai belum efektif karena belum memiliki mekanisme yang memadai dan berkala baik jangka panjang maupun jangka pendek, tidak ada pihak Lembaga Masyarakat atau Pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi, serta tidak ada kejelasan tujuan dari bentuk monitoring dan evaluasi.

B. Perbandingan Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perbandingan Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan adalah sebuah topik penelitian yang cukup relevan dan penting. Kebijakan ini mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan di desa baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik untuk kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Provinsi NTB khususnya di Lombok Timur dan Lombok Utara memiliki geografis dan masalah sosial yang unik, termasuk isu yang beragam yang dihadapi perempuan pada wilayah perdesaan. Oleh karenanya membandingkan Evaluasi Kebijakan di dua Kabupaten ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang peran dan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan di desanya serta membuka pengetahuan persamaan dan perbedaan dalam pendekatan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan.

Oleh karenanya, dengan membuat perbandingan untuk menilai tingkat kinerja Kebijakan dari Kementerian PP dan PA. Peneliti menggunakan tiga kriteria untuk

mengukur kinerja kebijakan yaitu Efektivitas, Efisiensi, dan Responsivitas. Peneliti perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi diantara kedua Kabupaten tersebut dimulai dengan faktor Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang kedua Kabupaten tersebut sama-sama rendah sehingga dengan melihat data kesenjangan/gap yang tinggi antara perempuan dan laki-laki hal ini menunjukkan banyak isu-isu ketidaksetaraan gender. Disamping memiliki persamaan wilayah administrative di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sama-sama berada di Kepulauan Lombok, memiliki garis pantai panjang, daerah pegunungan, iklim tropis, dan potensi wilayah yang sama. Ternyata juga memiliki kesamaan pada permasalahan kemiskinan, budaya patriarki, serta norma adat dan agama yang kuat. Namun setelah terjun ke lapangan, peneliti menemukan ada perbedaan karakteristik penduduk yang bisa digali. Penduduk Lombok Timur dengan jumlah 99% penduduknya beragama Islam maka kecenderungan itu memperkuat homogenitas mayoritas penduduk beragama yang sama. Berbeda dengan penduduk Lombok Utara yang lebih pluralis, keanekaragaman agama ada di wilayah tersebut. Berangkat dari permasalahan diatas, maka Kementerian PP dan PA serius untuk mengeluarkan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan melalui Program PIRITAS Nasiola di Provinsi NTB dipilih dua Kabupaten yaitu Lombok Timur dan Lombok Utara. Dua wilayah tersebut sama-sama mendapatkan program pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan. Meskipun memiliki persamaan kendala efektivitas dan efisiensi dalam tahap persiapan pelatihan dari segi efektivitas keterlibatan antar pihak juga masalah efisiensi aturan anggaran yang kaku, keterbatasan anggaran, serta kendala di wilayah Lombok Utara terkait proses pencarian calon peserta perempuan potensial.

Hasil data di lapangan menunjukkan perbedaan hasil yang berbeda, peserta Lombok Timur lebih memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dibanding peserta Lombok Utara yang hasilnya tidak efektif karena kendala latar belakang yang berbeda dengan peserta Lombok Timur, yaitu Lombok Utara hanya Sebagian kecil merupakan Anggota Sekolah Perempuan dimana sebelumnya kurang mendapat intervensi atau pendekatan yang matang dibanding dengan peserta Lombok Timur. Selain itu kendala dukungan dari pasangan dan lingkungan yang berbeda pemahaman serta pandangan terkait norma adat, agama, dan budaya patriarki, juga masalah jarak rumah yang juga dan waktu pelatihan yang sangat terbatas. Untuk tahap pendampingan juga mengalami hasil yang berbeda bahwa tingkat efektivitas lebih tinggi pada peserta Lombok Timur dibanding dengan Lombok Utara, hal tersebut terkendala dengan masalah yang sama. Pada tahap monitoring dan evaluasi memiliki persamaan bahwa kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan yang dimiliki oleh Kementerian PP dan PA dinilai tidak efektif karena belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang sudah dibangun, tidak keterlibatan antar pihak untuk proses monitoring dan evaluasi, serta tujuan yang tidak jelas dari tahap monitoring dan evaluasi.

C. Rekomendasi Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari pembahasan mengenai alternatif rekomendasi diatas, maka dengan menggunakan *Grid Analysis*, peneliti menyampaikan rekomendasi evaluasi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan potensial perdesaan dalam rangka

pemberdayaan perempuan di dua wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara dengan melihat beberapa aspek permasalahan di lapangan yang sudah diidentifikasi dengan menggunakan Teorinya Dunn (1999) yaitu : Aspek Keterlibatan Antar Pihak yang Tidak Efektif, Aspek Sumber Daya yang Tidak Efisien, Aspek Hasil Pelaksanaan Pelatihan yang Tidak Efektif dan Responsif di Kabupaten Lombok Utara, Aspek Hasil Pendampingan yang Tidak Efektif di Kabupaten Lombok Utara, Aspek Monitoring dan Evaluasi yang Tidak Efektif. Berdasarkan masalah tersebut diatas peneliti merekomendasikan beberapa alternatif kebijakan untuk Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan yaitu :

1. Kementerian PP dan PA membentuk “Tim Manajemen Kolaborasi”, merupakan sistem mekanisme forum/ dialog tim Kerjasama formal yang bersifat regular/ berkala antar pihak melibatkan unsur pemerintah pusat maupun daerah, organisasi perempuan, pakar, praktisi, akademisi, sektor swasta, organisasi internasional;
2. Kementerian PP dan PA membuat Model Pemberdayaan Perempuan di kalangan akar rumput di seluruh Indonesia, seperti: Sekolah Perempuan yang memiliki pengalaman dalam melatih peserta akar rumput dengan karakteristik yang serupa
3. Kementerian PP dan PA membangun mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang berkala dan terus-menerus selama program berjalan, hal ini memungkinkan pengukuran dampak jangka panjang dari program dan identifikasi perubahan yang perlu dilakukan selama pelaksanaan program.

Tabel 2. Grid Analysis dengan Tiga Kriteria Evaluasi (Skala 1-5)

No	Alternatif Kebijakan	Efficiency (30%)	Effectivity (40%)	Responsivness (30%)	Total
1	Kebijakan Membuat Tim Manajemen Kolaborasi	1,2	2	1	4,2
2	Kebijakan Membuat Model Pemberdayaan Perempuan	1,5	1,6	0,8	3,9
3	Kebijakan Membangun Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	1,2	1,6	1	3,8

Dari pembobotan pada kriteria pemilihan alternatif kebijakan di atas, terlihat bahwa kebijakan membuat Tim Manajemen Kolaboratif menduduki peringkat paling tinggi dengan nilai total 4,2. Itu berarti hampir semua kriteria evaluasi dapat dipenuhi oleh alternatif kebijakan ini.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang diuraikan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan yang paling tepat diterapkan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Alternatif Kebijakan Tim Manajemen Kolaborasi. Alternatif Kebijakan ini menekankan pada konsep kolaborasi antar pihak yang dapat bekerjasama secara efektif dalam konteks formal dan bersifat regular. Pihak melibatkan unsur pemerintah pusat maupun daerah, organisasi perempuan, pakar, praktisi, akademisi, sektor swasta, organisasi internasional. Wadah ini untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan berbagai pihak dapat melakukan koordinasi, komunikasi, kolaborasi antar pihak. Sistem ini dapat mencakup, misalnya pengaturan jadwal pertemuan, sharing dokumen, pemantauan program, pelaporan kemajuan, pelatihan/ workshop utk anggota tim, membuat strategi peningkatan fleksibilitas anggaran, membentuk mekanisme perubahan anggaran, meningkatkan dan mencari alokasi sumber pendanaan tambahan, serta wadah tersebut dapat digunakan untuk memantu masalah-masalah di lapangan seperti bagaimana memeberikan

pendekatan khusus kepada wilayah/ peserta yang dinilai kurang, serta wadah ini dapat digperankan sebagai sarana kampanye, edukasi, promosi utk pasangan dan tokoh-tokoh agama, adat dan masyarakat setempat. Sistem ini dapat membantu dalam manajemen resiko, pengambilan keputusan, dan pematauan capaian tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, N. I., & Tini, D. L. R. (2021). The Role of Women Village Heads in Decision Making Process in Lembung Timur Village. *Journal of Local Government Issues*, 4(2), 90–105.
- A Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asropi. (2020). *Sustainable Development in Local Government: A Lesson from Indonesia*. www.ijicc.net. (Vol 10(10), p. 579-593
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, (2020). *Pendataan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan gender Tahun 2020-2022*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik.
- Beaman, L., Duflo, E., Pande, R., & Topalova, P. (2012). *Female leadership raises aspirations and educational attainment for girls: A policy experiment in India*. *Science*, 335(6068), 582–586. <https://doi.org/10.1126/science.1212382>
- Bem, S.L. (1981). *Gender Schema Theory : A Cognitive account of sex typing source*. *Psychological review*, 88 354 [Online] www.webster.edu/~woolfm/sandrabem.htm tanggal akses : 20 Juni 2023
- Carsten Anckar (2018) *On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the Most Different Systems Design in Comparative Research* *International Journal of Social Research Methodology* 11(5):389-401 DOI:[10.1080/13645570701401552](https://doi.org/10.1080/13645570701401552)
- Chatterjee, S. (2016). *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES & SOCIAL STUDIES Leadership , Women Leadership and Rural Development (With Special Reference to Panchayati Raj in India)*. March.
- Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). *Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India*. *Econometrica*, 72(5), 1409–1443. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x>
- Djaali, Mulyono, P., & Ramly. (2000). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PPs UNJ.
- Dunn, N. William. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah. Mada Press

- Ely, R. J., Ibarra, H., & Kolb, D. M. (2011). *Taking Gender Into Account: Theory and Design for Women's Leadership Development: Discovery Service for American College of Education*. *Academy of Management Learning & Education*, 10(3), 474–493. <http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=f9c5eb67-fe3b-4bb0-97bd-0e6e5319a282@sessionmgr4003&hid=4208>
- Emzir. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fitriyah, K., Kantun, S., & Sukidin. (2019). *The strategy of the women's leadership (a case study of the head village in Puger Subdistrict)*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 243(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/243/1/012088>
- Garbuja, B. P., & Pasa, R. B. (2016). *Role of Technical and Vocational Education and Training in Women Empowerment: A Case from Bima VDC of Myagdi District, Nepal*. *Journal of Training and Development*, 2(August 2016), 33–41. <https://doi.org/10.3126/jtd.v2i0.15436>
- Gilani, P., Rook, C., Razeghi, Y., & Carr, M. (2022). *Swimming against the current: Negotiating leadership challenges for women in Iran*. *Leadership*, 18(1), 162–185. <https://doi.org/10.1177/17427150211047102>
- Jacka, T. (2008). Increasing women's participation in Village Government in China: Is it worth it? *Critical Asian Studies*, 40(4), 499–530. <https://doi.org/10.1080/14672710802505265>
- Kanter, Rosabeth Moss. (1977) . *Men and Women of the Corporation*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartini, Kartono. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju 1996 : h.32.
- Karunia, R. L., Budiaji, R., Suzana, R., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). Analysis of the Factors that Affect the Implementation of E-Government in Indonesia. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(3), 46–54. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1216>
- Karunia, R. L. (2020). The Influence of Leadership, Organisational Structure, and Organisational Culture on the Company Performance of PT NK TBK. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(2), 164–178.
- KAPAL Perempuan, dkk. *Buku Daya Perempuan Akar Rumput, Kepemimpinan Perempuan untuk Perubahan* (2020), Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021). *Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan*, Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. *Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender*
- Kementerian PP dan PA. 2018. *Buku Pedoman Panduan Praktis Memahami PPRG di Daerah*

- Nawawi, Hadari. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pers.
- Nugroho, A. A., & Rahayu, N. S. (2020). Transformation of Innovation Values and Culture: Innovation Analysis of Regional Planning System in Special Region of Yogyakarta, Indonesia. In *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *Www.ijicc.net* (Vol. 11, p. 2020). *www.ijicc.net*
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan. Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*. (p. 898). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2015). Basic methods of policy analysis and planning. In *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. <https://doi.org/10.4324/9781315664736>
- Silitonga, M.S., Anthonio, G., Heyse, L., Wittek, R. (2016). Institutional Change and Corruption of Public Leaders: A Social Capital Perspective on Indonesia. In: Holzhacker, R., Wittek, R., Woltjer, J. (eds) *Decentralization and Governance in Indonesia. Development and Governance*, vol 2. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3_9
- Silitonga, M. S., van Duijn, M., Heyse, L., & Wittek, R. (2019). Setting a Good Example? The Effect of Leader and Peer Behavior on Corruption among Indonesian Senior Civil Servants. *Public Administration Review*, 79(4), 565–579. <https://doi.org/10.1111/puar.13059>
- Stake, E. Robert. (1976). *Center For Instructional Research Ana Curriculum Evaluation Countenance*. Illinois: University of Illinois.
- Sugiyanto, E. K. (2020). Women Leadership Paradigm: Pro and Contra on Women As Leaders in Various Views. *Economics and Business Solutions Journal*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.26623/ebsj.v4i1.2241>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suharto, E. (Ed.). (2004). *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Balitbangsos Departemen Sosial RI.
- Supiandi Yusuf, 2020, *Kajian Model Pilot Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Desa*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
- Suparno.A.S., 2001, *Membangun Kompetensi Dasar*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
- Suryanto, A. (2018). Strategi Peningkatan Efektifitas Pelatihan Kepemimpinan: Telaah Teoretis dan Empiris. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.24258/jba.v14i1.337>

- Suryanto, A., Nurdin, N., Irawati, E., & Andriansyah. (2023). Digital transformation in enhancing knowledge acquisition of public sector employees. *International Journal of Data and Network Science*, 7(1), 117–124. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.11.011>
- Suryanto, A., & Nugroho, A. A. (2020). Improving Public Participation in Innovation Management of Village-Owned Enterprise: Lesson Learned From the Best Village-Owned Enterprise in Indonesia. *PalArch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(4), 2072–2082.
- Suryanto, A., Prasetyo, A. G., Nurdin, N., & Aswad, M. (2023). The Reform of Apparatus Competence Development in Indonesia: Improving the Implementation System and the Implementing Actors. *Information Sciences Letters*, 12(4), 1307–1317. <https://doi.org/10.18576/isl/120445>
- Sutanto, E. M., & Aveline, V. (2021). Women leadership and its association to individual characteristics, social support, and diversity of work environment. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 807–817. <https://doi.org/10.33736/ijbs.3760.2021>
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: UNDIP.
- Topalova, P., & Duflo, E. (2015). Unappreciated Service : Performance , Perceptions , and Women Leaders in India Unappreciated Service : Performance , Perceptions , and Women Leaders in India. *Manuscript, Department of Economics ...*, March. <https://www.almendron.com/tribuna/wp-content/uploads/2016/03/unappreciated-service-performance-perceptions-and-women-leaders-in-india.pdf>
- Vaughn Hokanson, (2017) *Book Review: Deborah Rhode, Women and Leadership*, 9 ConLawNOW, 1000
- Wandia, M. E., & Njoroge, J. (2022). Effect of Social- Cultural Values on Women Leadership in Murang'a County Government. *Journal of Public Policy & Governance*, 6(1), 35–45. <https://doi.org/10.53819/81018102t4034>
- Wells, K., & Fleshman W, J. (2020). Women in leadership. *SA Pharmaceutical Journal*, 87(5), 42
- Widodo, Joko. (2008) *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative

